

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1990.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta. 1997.
- Kosnadi Hardjosumantri, *Hukum Pelindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta. 1993.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Erlangga, Bandung. 1986.
- Dixon, J.A. dan Paul B. Sherman. *Economic of protected Areas; A New Look at Benefit and cost*. East-west Center. Landon. 1990.
- Muh. Yamin. *Tata Negara Majapahit*. Yayasan Prapantja. Djakarta. 1962
- Miller, dalam Soeari, Herman. *Menyongsong Kehadiran Taman Nasional Di Indonesia*. Ditjen PPA
- McNeely, Jeffrey.A., 1999. The Ecosystems Approach for Sustainable use of Biological Resources; An IUCN Pwespective dalam Schei dkk., 1999, *Proceeding of the Norway/UN Conference on Norway/UN Conference on Ecosystem Approach for Sustainable Use of Biological Diversity*, Trondheim. 6-10 September 1999.
- Zimbabwe Trust, 1990; Padilla, 1995. dalam Miller, 1999, *Bioregional Planning and Biodiversity Conservation*, dalam Stolton, Sue dan Dudley, Nigel, 1999, *Partnership for Protection, new Strategies for Plainning and Management for Protected Areas*, WWF, IUCN, Earthscan Publications Ltd London.
- Wiratno, Daru Indriyo, Ahmad Syarifudin, Ani Kartikasari. *Berkaca Di Cermin Retak Refelksi Konserfasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*
- Ramphal, Sir Shridath, 1993. *How Prorected Areas Can Meet Society's Needs; The Social, Economic and Political Issues* dalam valerie Barzetti, 1993. *Paris and Progress; Protected Areas and Economic Development in Latin America and the Caribbean*, IUCN-The World Conservation Union in

Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2002.

### **Peraturan-peraturan**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No 48/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
5. Keputusan Menteri Kehutanan No 134/Menhut-II/2004 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas 6.410 ha, yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional telah